



Dampak kebijakan dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Studi komparasi di Desa Ponggok, Desa Tegalrejo, dan Desa Kalangan, Klaten, Jawa Tengah)

Fadli Razzak¹⁾, Zuly Qodir²⁾

^{1,2)}Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183

Email: fadli.razzak@gmail.com

Info artikel

Article History

Naskah diterima:
9 Januari 2020

Naskah direvisi:
27 Januari 2020

Naskah disetujui:
28 Januari 2020

Kata kunci:

**Otonomi Daerah,
Dana Desa,
Kesejahteraan
Masyarakat,
Pengangguran**

Abstrak

Perubahan sistem pemerintahan yang mendasar di Indonesia setelah reformasi adalah diberlakukannya desentralisasi dan otonomi daerah secara nyata. Pemberian dana desa menjadi bentuk pemenuhan hak-hak desa untuk pelaksanaan otonomi sendiri untuk tumbuh dan berkembang mengikuti keragaman, partisipasi, otonomi, pemberdayaan, demokratisasi masyarakat serta meningkatkan peran pemerintah desa dalam rangka memberikan layanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada wilayah-wilayah yang terombang-ambing. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dampak kebijakan dana desa terhadap meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi pengangguran di Desa Ponggok, Desa Tegalrejo, dan Desa Kalangan Klaten. Desa Ponggok dipilih karena merupakan desa percontohan yang berhasil mengelola dana desa yang diberikan untuk menyejahterakan masyarakatnya. Desa Ponggok menggunakan dana desanya untuk mengadakan sarana prasarana pendukung keberlangsungan Desa Wisata Ponggok, mengadakan program pelatihan, MCK tiap rumah, serta bantuan lain yang dapat menyejahterakan warganya, dan seluruh masyarakat turut berpartisipasi dalam program yang diselenggarakan. Hasilnya, program tersebut dapat mengurangi jumlah pengangguran secara signifikan. Desa Tegalrejo menggunakan dana desanya untuk perbaikan infrastruktur desa dan pelatihan masyarakatnya. Desa Kalangan menggunakan dana desanya untuk perbaikan infrastruktur desa, reboisasi, pelatihan serta pembinaan masyarakat. Namun, hasil pengelolaan dana desa kedua desa tersebut belum dapat meningkatkan perekonomian dan mengurangi pengangguran, karena kurangnya partisipasi dari masyarakat terhadap program yang diselenggarakan.

PENDAHULUAN

Perubahan sistem pemerintahan yang mendasar di Indonesia setelah reformasi adalah diberlakukannya desentralisasi dan otonomi daerah yang dilaksanakan secara nyata melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999. Dalam perjalanannya UU 22/1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah adalah pemberian kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan menjalankan pembangunan di daerahnya. Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan di segala bidang ([Atmadja, 2009: 176](#)). Hal ini dimaksudkan agar daerah memiliki kesempatan untuk pengembangan diri

dan mewujudkan harapan masyarakat agar bisa menikmati pelayanan publik yang lebih baik sesuai dengan kondisi dan keberadaan mereka.

Desentralisasi kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana dan prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Diterbitkannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, posisi pemerintahan desa semakin menjadi kuat. Oleh karena itu, pemerintah berusaha mewujudkan pembangunan pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Dana Desa (DD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri.

Kebijakan pemerintah dengan adanya dana desa sebagai kebijakan baru yang merupakan pengembangan dari kebijakan sebelumnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan ([Jamaluddin, 2018: 15](#)). Pemberian dana desa menjadi bentuk pemenuhan hak-hak desa untuk pelaksanaan otonomi sendiri untuk tumbuh dan berkembang mengikuti keragaman, partisipasi, otonomi, pemberdayaan, demokratisasi masyarakat serta meningkatkan peran pemerintah desa dalam rangka memberikan layanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada wilayah-wilayah yang terombang-ambing.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menjelaskan bahwa Dana Desa ditujukan membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah sejak 2015 telah mengalokasikan sebagian kecil anggarannya untuk program dana desa, yang bertujuan untuk membangun desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sejak 2015 sampai 2017, anggaran dana desa terus mengalami peningkatan, terbukti di tahun ini telah dialokasikan pada APBNP sebesar Rp 60 triliun yang akan disebar ke 75 ribu desa di seluruh Indonesia ([jefriando/detikfinance.com:2017](#)).

Pemberian dana desa pada masing-masing desa berbeda-beda, tergantung dari kondisi desa itu sendiri. Salah satu contoh penggunaan dana desa yaitu di Desa Ponggok, Klaten, Jawa Tengah. Kepala Desa Ponggok Junaedhi Mulyono ([detikfinance.com:2017](#)) mengatakan, dari dana desa kini Desa Ponggok memiliki pendapatan yang cukup besar, dari pengembangan desa menjadi Desa Wisata.

Anggaran dana desa Ponggok pada 2015 sebesar Rp 277 juta dan digunakan untuk membangun infrastruktur dasar. Di tahun 2016, anggaran meningkat menjadi Rp 622 juta dan penggunaannya tetap untuk infrastruktur dasar. Sedangkan tahun 2017, menjadi Rp 634 juta untuk membangun saluran drainase, infrastruktur jalan, area parkir sebagai dukungan pariwisata. Program unggulan Desa Ponggok adalah mengenai satu rumah satu sarjana yang intinya memperbaiki sektor pendidikan. Keberhasilan Desa Ponggok memanfaatkan dana desa ini dikarenakan keterlibatan langsung masyarakat dan transparansi penggunaan dana desa ([detikfinance.com:2017](#)).

Selain Desa Ponggok, terdapat pula Desa Tegalrejo dan Desa Kalangan yang menjadi sentra peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Klaten. Desa Tegalrejo terletak di Kecamatan Ceper dan merupakan kawasan industri terbesar di kota Klaten, atau lebih sering dikenal dengan kawasan industri Batur Jaya. Wilayah ini tumbuh dan berkembang usaha pengecoran logam yang mampu memberikan kesejahteraan bagi warganya, bahkan sejumlah orang dari luar daerah. Kontribusi yang besar dari industri ini tidak hanya membuat kesejahteraan warganya membaik, tetapi juga membantu pertumbuhan perekonomian di Klaten, bahkan nasional ([Prasetyo & Tri 2014](#)).

Sedangkan Desa Kalangan adalah kawasan desa yang sedang dimunculkan sebagai kawasan agrowisata oleh Kepala Desa Kalangan. Salah satu program yang telah dimunculkan yaitu program wisata pemancingan. Ini bukanlah semata mata untuk membuat tempat wisata pemancingan saja, namun untuk kepentingan umum, dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kalangan ([Anonim, 2016](#)).

Untuk melihat perkembangan dana desa selama 4 tahun yang terdapat di Desa Ponggok, Desa Tegalrejo, dan Desa Kalangan Klaten dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.
Perkembangan Dana Desa Desa Ponggok, Desa Tegalrejo, dan Desa Kalangan Klaten

No.	Tahun	Jumlah Penduduk	Presentase Penduduk Miskin	Dana Desa	Rata-rata Penghasilan Penduduk per Bulan	Angka Pengangguran
1.	<i>Desa Ponggok (Kawasan Desa Industri)</i>					
	2015	2.072	30%	277.218.000	1.300.000	20%
	2016	2.101	20%	644.188.000	1.500.000	10%
	2017	2.124	15%	793.664.000	1.500.000	5%
	2018	2.185	10%	815.082.000	2.000.000	5%
2.	<i>Desa Tegalrejo Ceper (Kawasan Desa Industri)</i>					
	2015	3220	20%	275.774.000	1.300.000	20%
	2016	3265	20%	619.173.000	1.500.000	10%
	2017	3715	18%	789.759.000	1.500.000	5%
	2018	3960	16%	734.366.000	1.700.000	5%
3.	<i>Desa Kalangan (Kawasan Desa Agro Pertanian)</i>					
	2015	6.655	8,96%	297.096.000	800.000	46%
	2016	6.712	7,67%	663.712.000	1.000.000	34%
	2017	6.757	7,31%	847.431.000	1.200.000	28%
	2018	6.889	5,79%	919.971.000	1.400.000	12%

Berdasarkan Tabel 1 yakni Desa Ponggok, Desa Tegalrejo, dan Desa Kalangan diketahui bahwa jumlah penduduk selama tahun 2015 sampai tahun 2018 selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan Tabel 1 pula diketahui bahwa tidak ada desa yang mengalami peningkatan presentase jumlah penduduk miskin maupun pengangguran setiap tahunnya. Bahkan, rata-rata penghasilan penduduk dari ketiga desa tersebut hampir selalu mengalami peningkatan antara Rp200.000,00 - Rp500.000,00 per bulan. Jumlah dana desa dari ketiga desa tersebut juga mengalami peningkatan sampai 100% jika dihitung dari awal tahun 2015 ke tahun 2018.

[Sunu & Utama \(2019\)](#) dalam penelitiannya tentang pengaruh Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali telah membuktikan bahwa dana desa berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, dana desa berpengaruh positif pada tingkat kesejahteraan masyarakat, dan tingkat kemiskinan berpengaruh negatif pada kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman, tentram, baik lahir maupun batin ([Fahrudin, 2012](#)). Penelitian [Jamaluddin dkk \(2018\)](#) tentang Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah, menemukan bahwa penggunaan dana desa dan pengelolaannya tidak signifikan berdampak pada pertumbuhan pembangunan daerah dan program pembangunan desa tidak sinkron dengan kebijakan pembangunan daerah.

[Sari & Abdullah \(2017\)](#) dalam penelitiannya tentang analisis ekonomi kebijakan dana desa terhadap kemiskinan desa di Kabupaten Tulungagung pada Tahun 2015-2016, menunjukkan bahwa dana desa berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan desa. Dana Desa dan ADD terbukti efektif dan berhasil mengurangi kemiskinan pada 13 desa di Kabupaten Tulungagung, sedangkan sisanya 114 desa, menunjukkan hasil yang tidak efektif dalam mengurangi kemiskinan. Hal ini dikarenakan sebagian besar penggunaan Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik pedesaan sebesar 84%, sedangkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat masih tergolong kecil yaitu 6,5%. Selain itu, kualitas dari sarana dan prasarana yang dibangun masih kurang baik akibat minimnya kemampuan teknis dari pengelola, baik dari segi perencanaan maupun pengelolaannya.

Dampak program dana desa terhadap peningkatan ekonomi dapat dilihat dari hasil penelitian Tangkumahat dkk (2017) di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa: 1) kebijakan program dana desa dapat berjalan cukup baik, sesuai dengan berbagai persiapannya, pelaksanaan setiap kegiatan, evaluasi kegiatan sampai tahap penyusunan pertanggungjawaban. 2) Adanya peningkatan perekonomian masyarakat karena adanya peningkatan pembangunan infrastruktur sehingga akses pengangkutan dari lokasi perkebunan dapat lebih mudah sehingga mempercepat proses penjualan hasil-hasil pertanian.

[Yulita \(2016\)](#), dalam penelitiannya di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, menemukan bahwa faktor yang memengaruhi efektivitas penggunaan dana desa yaitu: 1) Sumber daya manusia, yaitu kemampuan aparatur desa dalam upaya mengatur serta menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) maupun dalam menyusun laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) masih rendah karena aparatur desa masih kurang memahami dalam melakukan input data pemasukan dan pengeluaran. 2) Koordinasi yang kurang baik antara Pemerintah Kabupaten, Dinas Bapesmas-Pemdes dengan Pemerintah Kecamatan terkait Laporan SPJ ini belum begitu paham.

Sesuai dengan uraian latar belakang di atas dan berbagai penelitian yang telah dilakukan, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai dampak kebijakan dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Ponggok, Klaten. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak kebijakan alokasi dana desa terhadap pembangunan ekonomi di desa setempat. Studi komparatif digunakan untuk membandingkan efektifitas pelaksanaan dana desa.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan mengungkapkan permasalahan kehidupan kerja pada suatu organisasi pemerintah maupun organisasi lain yang dapat dijadikan sebagai kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama. Penelitian ini dilakukan di Desa Ponggok, Desa Tegalrejo, dan Desa Kalangan, Kecamatan Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung kepada Pemerintah Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat yang relevan dengan masalah penelitian. Observasi dilakukan dengan mendatangi lokasi untuk mengamati langsung situasi, kondisi, serta berbagai fenomena yang tampak pada objek penelitian. Teknik dokumentasi pada penelitian ini dilakukan dengan mempelajari, mencatat dan mengambil sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, baik berupa dokumen atau arsip.

Analisis data dilakukan dengan empat langkah. Pertama, pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Kedua, reduksi data, yaitu

menyederhanakan, mengkode, memilih dan memusatkan data yang diperoleh sesuai dengan yang dibutuhkan. Ketiga, display data dilakukan dengan memberikan kemungkinan adanya kesimpulan yang dapat ditarik serta tindakan yang diambil. Keempat, verifikasi dan penegasan kesimpulan, yaitu mendeskripsikan fakta di lapangan untuk menjawab rumusan masalah dengan tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini dilakukan pada tiga desa, yaitu Desa Ponggok, Desa Tegalrejo, dan Desa Kalangan, Kecamatan Polanharjo, Klaten, Jawa tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari penggunaan dana desa oleh ketiga desa tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan MSD, bahwa program pemerintah desa Ponggok sudah diketahui masyarakat setempat. Informan MSN juga menyatakan bahwa pemerintah desa Kalangan sudah menyelenggarakan beberapa program yang diperuntukkan bagi masyarakat desa. Hal demikian menunjukkan bahwa pemerintah desa sudah menggunakan dana desa yang diterimanya untuk menyelenggarakan program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Program-program tersebut juga sudah diketahui dan diikuti oleh masyarakat desa. Hasil penelitian juga mengungkapkan bentuk-bentuk program atau kegiatan yang dilakukan pemerintah desa dengan dana desa yang diperoleh, sosialisasi yang dilakukan untuk menarik partisipasi masyarakat yang menjadi sasaran atau target utama kegiatan, pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut, dampak yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi dari kegiatan tersebut. Hasil penelitian ini diuraikan sebagai berikut.

Bentuk Kegiatan

Pemanfaatan dana desa untuk pengembangan dan mensejahterakan masyarakat desa dilakukan pemerintah desa dalam berbagai bentuk kegiatan. Pada Desa Ponggok, dana desa digunakan untuk memberikan bantuan berupa peralatan membuat produk makanan olahan khas desa maupun buah tangan untuk oleh-oleh wisatawan yang berkunjung. Selain itu, dana desa juga digunakan untuk membuat program “satu rumah satu MCK”, memperbaiki lingkungan dan melakukan perbaikan beberapa rumah masyarakat desa, dengan tujuan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan masyarakat desa. Dana desa juga digunakan untuk pelatihan, *workshop*, bantuan modal dan bantuan alat, dengan tujuan menciptakan UKM desa.

“Kemandirian juga sudah, program rumah, 1 rumah 1 mck. Keadilan ini berkat dengan pendanaan desa tahun 2015-2019, nah ketimpangan kesenjangan sosial ini, kita tutup, ini kemiskinan, gini ya ponggok dah maju, dukuh 1 itu masih tertinggal, nah dana desa kita pupuk disana untuk tata ruang dan lingkungan dimana kami membuat rehab rumah, penanganan pemukiman, ramah anak, ramah lingkungan, termasuk juga kami membuat tempat destinasi wisata untuk dikembangkan agar menggerakkan ekonomi di sana.” (Hasil wawancara dengan informan KDP – Desa Ponggok)

Pada Desa Kalangan, bentuk kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa berupa pengembangan infrastruktur, pemberdayaan sumber daya manusia.

“Pengembangan fisik, pemberdayaan seperti pelatihan karataruna, pembuatan bibit ibu PKK.” (Hasil wawancara dengan informan MSN – Desa Kalangan)

Sedangkan pada Desa Tegalrejo, bentuk kegiatan yang dilakukan berupa perbaikan kondisi fisik desa, seperti pembenahan jalan dan reboisasi. Selain itu ada pula program

Pelatihan yang diberikan berupa pembibitan ikan lele, menjatih, membuat kripik pare, pembinaan olahraga dan hadroh.

Dampak pada Jumlah Pengangguran

Pada Desa Ponggok, kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa menggunakan dana desa dinilai dapat meningkatkan lapangan pekerjaan di desa, dan dapat menyerap banyak tenaga kerja yang merupakan masyarakat desa. Oleh karena itu, jumlah pengangguran di Desa Ponggok berkurang atau bahkan sudah tidak ada, karena semua masyarakat sudah memiliki mata pencaharian, baik dengan membudidayakan ikan nila, maupun karena adanya Desa Wisata Desa Ponggok.

Berbeda dengan Desa Kalangan dan Desa Tegalrejo, bahwa program kegiatan yang diselenggarakan menggunakan dana desa belum dapat menambah lapangan pekerjaan yang dapat mencakup banyak masyarakat sekitar. Kegiatan yang diselenggarakan Desa Kalangan hanya berfokus pada infrastruktur. Hal tersebut menunjukkan bahwa program yang diselenggarakan kurang efektif untuk membuka lapangan kerja baru yang dapat menampung masyarakat sekitar.

Dampak pada Perekonomian Masyarakat

Selain berdampak pada bertambahnya jumlah kesempatan kerja, namun juga dapat berdampak pada perekonomian masyarakat. Pada Desa Ponggok, terjadi peningkatan perekonomian masyarakat. Peningkatan tersebut tampak pada terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga, kebutuhan psikologis dan kebutuhan untuk mengaktualisasi diri, dapat menyekolahkan anak-anaknya, dan dapat memberikan sumbangan secara sukarela.

Sedikit berbeda dengan yang terjadi di Desa Kalangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan yang diselenggarakan masih berfokus pada pembangunan infrastruktur desa. Kegiatan untuk pemberdayaan masih kurang maksimal, sehingga perekonomian masyarakat menjadi kurang maksimal. Sama halnya dengan yang terjadi pada Desa Tegalrejo. Kegiatan yang diselenggarakan belum dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa Tegalrejo secara menyeluruh.

Hambatan yang Dialami

Hambatan yang dialami Desa Ponggok selama penyelenggaraan kegiatan adalah sumber daya manusia yang belum merata.

“SDM belum merata, masyarakat belum satu visi, konteksnya terbatas pada masyarakat.”
(Hasil wawancara dengan informan KDP – Desa Ponggok)

Hambatan penyelenggaraan kegiatan di Desa Kalangan, yaitu kurangnya waktu yang disediakan untuk melaksanakannya. Selain itu, respon yang diberikan masyarakat juga rendah. Sama halnya dengan Desa Tegalrejo, hambatan utamanya adalah rendahnya partisipasi karangtaruna dalam kegiatan.

Pembahasan

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang ditujukan bagi desa (PP No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN Pasal 1 poin 2). Dana tersebut diberikan dalam bentuk transferan melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Desa Ponggok menggunakan dana desanya untuk berbagai keperluan, seperti pengadaan peralatan. Bantuan berupa peralatan tersebut diberikan dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam menemukan sumber daya yang

tepat untuk membuat produk unggulan, seperti makanan olahan khas desa maupun buah tangan untuk oleh-oleh wisatawan yang berkunjung. Selain itu, peralatan yang diberikan juga digunakan untuk membantu memudahkan masyarakat desa dalam proses produksi produk olahan makanan maupun produk lain yang dinilai berharga. Dana desa juga diperuntukkan membangun Desa Ponggok sebagai desa wisata, yaitu dengan memperbaiki dan menjaga lingkungan sekitar, serta melengkapi fasilitas penunjang wisata, sehingga dapat menarik wisatawan, baik lokal maupun manca, untuk datang ke desa Ponggok dan menikmati setiap alam, makanan olahan serta fasilitas lainnya.

Untuk menciptakan masyarakat yang bersih dan sehat, pemerintah desa menyelenggarakan program rumah, yaitu satu rumah satu MCK. Program ini diselenggarakan karena masih ada masyarakat yang belum memiliki MCK yang layak di rumahnya. MCK yang disediakan digunakan oleh beberapa keluarga yang berada di sekitarnya. Oleh karena pemerintah ingin menciptakan lingkungan desa yang bersih dan sehat, sehingga masyarakatnya juga dapat terdampak sehat, maka dengan program satu rumah satu MCK ini sebagai salah satu kebijakan yang ditetapkan. Adanya keterbatasan dana desa, maka program ini hanya diberikan kepada beberapa rumah setiap tahunnya dan akan terus dilakukan hingga seluruh rumah memiliki minimal satu MCK.

Selain program tersebut, pemerintah juga mengalokasikan dana desa yang diperoleh untuk memperbaiki lingkungan dan melakukan perbaikan beberapa rumah masyarakat desa. Rumah yang diperbaiki merupakan rumah masyarakat yang mengalami kerusakan dan terlihat kurang layak ditempati. Pemerintah juga menggunakan dana desa untuk membuat lingkungan yang ramah anak serta membuat desa menjadi layak sebagai destinasi desa wisata. Hal demikian dilakukan dengan tujuan untuk menggerakkan perekonomian di desa, serta dapat memproduktifkan masyarakat desa untuk menghasilkan pendapatan.

Pemerintah melakukan kegiatan berupa pemberdayaan masyarakat dan lingkungan. Pemberdayaan yang dilakukan berupa pelatihan, *workshop*, bantuan modal dan bantuan alat. Pelatihan dan *workshop* diberikan dengan tujuan agar masyarakat dapat tertarik untuk menciptakan sesuatu dengan memanfaatkan sumber daya dari desa tersebut, serta memiliki keterampilan yang baik dalam membuat suatu olahan makanan atau karya seni yang dapat dijual kepada wisatawan. Pelatihan dan *workshop* ini tentunya dinaungi oleh UKM di bawah PKK yang ada di desa, dan dapat diikuti oleh setiap masyarakat yang ingin menambah keterampilan dan menambah pendapatan. Sebagai bentuk kepedulian, pemerintah desa juga memberikan bantuan modal agar usaha atau UKM yang dijalankan dapat berjalan dengan baik. Selain itu, agar produk yang dihasilkan dapat beredar luas dan diterima wisatawan, pemerintah melalui PKK memberi bantuan untuk membuat brand produk yang dapat diterima masyarakat luas.

Pada Desa Kalangan, bentuk kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa dengan melakukan pengembangan fisik, yaitu perbaikan dan pembangunan infrastruktur. Hal demikian dilakukan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses Desa Kalangan. Selain itu, pemerintah desa juga menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan melakukan pelatihan. Pelatihan ini dilakukan terhadap Karangtaruna dan juga ibu-ibu. Hal demikian dilakukan untuk meningkatkan keterampilan Karangtaruna dalam berbagai hal sehingga dapat lebih produktif dalam mengolah hasil sumber daya yang ada di desa serta dapat digunakan untuk mencari pekerjaan. Pelatihan pada ibu-ibu dilakukan dengan pelatihan pembuatan bibit tanaman yang nantinya dapat dijual kepada petani untuk disemai.

Kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa menggunakan dana desa, yaitu pelatihan menjahit dan pengelolaan sampah. Pelatihan menjahit dinilai sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena lebih mudah untuk diikuti, khususnya ibu-ibu.

Kegiatan pengelolaan sampah juga dinilai tepat, karena selain untuk mengolahnya menjadi produk yang dapat dijual, dapat juga untuk menjaga kebersihan desa.

Selain itu, kegiatan penggunaan dana desa pada Desa Kalangan juga berupa pelatihan MC dan pembawa acara. Pelatihan tersebut diberikan karena MC maupun pembawa acara pasti dibutuhkan untuk acara apapun, sehingga profesi sebagai MC dinilai memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga dana desa juga dialokasikan untuk pelatihan menjadi MC.

Pada Desa Tegalrejo, bentuk kegiatan yang dilakukan berupa perbaikan kondisi fisik desa, seperti pembenahan jalan dan reboisasi. Pembenahan jalan dilakukan dengan kegiatan paving, tujuannya agar akses menuju desa lebih mudah, aman dan nyaman. Kegiatan reboisasi dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan desa agar tetap dapat terjaga dan nyaman untuk ditinggali.

BPD Desa Tegalrejo menjelaskan bahwa kegiatan penggunaan dana desa berupa perbaikan infrastruktur desa, pelatihan dan pemberdayaan lansia. Perbaikan infrastruktur dilakukan dengan memperbaiki jalan desa dan lingkungan desa, sehingga masyarakat desa maupun luar desa dapat dengan nyaman melintas atau berkunjung ke Desa Tegalrejo. Pelatihan yang diberikan berupa pembibitan ikan lele, menjatih, membuat kripik pare, pembinaan olahraga dan hadroh. Pelatihan tersebut diberikan untuk meningkatkan kualitas masyarakat menjadi lebih baik dengan memiliki keterampilan untuk menyediakan bibit lele yang kemudian dapat menjadi bekal untuk membuat tambak lele, atau menjualnya kepada pembudidaya lele. Selain itu, adanya pelatihan menjahit dan membuat kripik sebagai alternatif pilihan bagi masyarakat jika kurang berminat untuk membudidayakan lele.

Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan pemerintah ditujukan untuk menyejahterakan masyarakatnya. Salah satunya adalah untuk mengurangi tingkat pengangguran yang ada di desa. Pengangguran yang dimaksud adalah masyarakat desa dengan usia produktif namun belum memiliki pekerjaan tetap. Dulu jumlah masyarakat yang belum memiliki pekerjaan atau menganggur, ada banyak. Namun, setelah adanya bantuan dana desa yang kemudian diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan dapat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berkurangnya jumlah pengangguran ini juga disebabkan karena adanya kegiatan pemerintah daerah yang memberdayakan masyarakat sekitar untuk turut serta dalam pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan desa. Selain itu, dengan adanya pabrik air minum mineral dalam kemasan yang mengambil sumber daya desa, juga memberdayakan masyarakat sekitar dalam proses produksinya. Namun, tidak sedikit masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang dengan dagangan utama adalah menjual berbagai sumber daya alam yang dibudidayakan, seperti ikan dan hasil pertanian lainnya.

Berbeda dengan yang terjadi pada Desa Kalangan, di mana kegiatan yang diselenggarakan dapat menurunkan jumlah pengangguran di Desa Kalangan melalui pelatihan pembibitan tanaman, namun belum dapat hal tersebut belum dapat mencakup banyak masyarakat desa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa menggunakan dana desa dinilai belum efektif menciptakan lapangan kerja baru yang mencakup seluruh masyarakat desa untuk mengurangi jumlah pengangguran.

Jumlah pengangguran di Desa Tegalrejo juga tidak mengalami perubahan. Dengan adanya kegiatan penggunaan dana desa ternyata belum dapat membuka lapangan kerja baru yang dapat mengurangi jumlah pengangguran di desa. Namun, kegiatan tersebut cenderung memberdayakan karangtaruna untuk lebih aktif mengelola desa dengan lebih baik. Tidak jauh berbeda dengan Desa Tegalrejo, bahwa kegiatan yang diselenggarakan belum dapat mengurangi jumlah pengangguran di desa dengan signifikan.

Selain berdampak pada jumlah pengangguran, pengalokasian dana desa oleh pemerintah desa juga berdampak pada perekonomian masyarakat Desa Ponggok. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pemanfaatan dana desa dengan mengadakan berbagai program untuk masyarakat desa. Melalui kegiatan tersebut pemerintah desa telah mampu membuat program-program yang baik, tetap sasaran dan tepat tujuan melalui pemanfaatan dana desa, sehingga dapat meningkatkan pendapatan guna pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Program UKM dapat membantu masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya sekitar untuk menghasilkan suatu produk yang bermanfaat dan bernilai. Selain itu, kegiatan UKM juga membantu masyarakat dalam meningkatkan penghasilannya. Kegiatan-kegiatan dari pemerintah desa tersebut cukup membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun demikian, kegiatan-kegiatan tersebut belum dapat secara maksimal dalam mendapatkan hasilnya.

Berdasarkan indikator kesejahteraan keluarga dari BKKBN, kebutuhan dasar pada masyarakat Desa Ponggok dengan adanya program penggunaan dana desa sudah dapat terpenuhi. Masyarakat Desa Ponggok dinilai sudah dapat memenuhi kebutuhan makan keluarga minimal dua kali sehari, memiliki pakaian layak pakai untuk kegiatan-kegiatan tertentu, tempat tinggal layak huni, dan mampu memeriksa kesehatan anggota keluarga minimal ke puskesmas setempat. Selain itu, Masyarakat Desa Ponggok juga mampu memenuhi kebutuhan psikologisnya dengan membeli daging, ikan maupun telur dalam seminggu untuk dikonsumsi bersama sebagai pemenuhan gizi seimbang. Hal demikian dikarenakan masyarakat Desa Ponggok juga membudidayakan ikan nila, sehingga dapat membeli dan mengonsumsi ikan dengan frekuensi lebih sering. Masyarakat usia produktif juga sudah mampu membaca dan menulis, dan setiap rumah tangga memiliki anggota yang memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keseharian. Kebutuhan pengembangan dan aktualisasi diri juga sudah terpenuhi bagi masyarakat Desa Ponggok, yang dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan masyarakat dan aktif mengikuti kepengurusannya, memberikan sumbangan secara sukarela, dan memperoleh informasi untuk memperbaharui pengetahuan melalui media massa maupun media internet.

Sedikit berbeda dengan yang terjadi di Desa Kalangan. Menurut masyarakat Desa Kalangan, kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa dengan menggunakan dana desa dinilai belum dapat meningkatkan penghasilan serta belum dapat mencukupi kebutuhan kesehariannya. Namun, kegiatan pemerintah desa tersebut dinilai hanya memajukan desa saja. Hal demikian menunjukkan bahwa kegiatan yang diselenggarakan pemerintah Desa Kalangan belum efektif untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Berdasarkan indikator kesejahteraan keluarga dari BKKBN, kebutuhan dasar pada sebagian masyarakat Desa Kalangan dengan adanya program penggunaan dana desa tidak terlalu berdampak signifikan pada pemenuhan kebutuhan dasar. Masyarakat sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar dengan ada atau tidak adanya dana desa tersebut. Kebutuhan dasar yang terpenuhi di antaranya kebutuhan makan minimal dua kali sehari, pakaian yang masih layak pakai, dengan kondisi tempat tinggal beberapa masyarakat masih beralaskan tanah dengan dinding semi permanen, dengan luas yang tidak terlalu besar. Sebagian masyarakat juga dapat mengonsumsi daging, ikan maupun telur, meskipun tidak rutin seminggu sekali. .

Kegiatan penggunaan dana desa oleh Pemerintah Desa Tegalrejo dinilai belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Masyarakat belum seluruhnya dapat merasakan peningkatan pada penghasilannya untuk mencukupi kebutuhan kesehariannya. Meskipun ada masyarakat yang merasa bahwa pendapatannya mengalami peningkatan, namun tidak signifikan. Selain itu, ada pula masyarakat yang tidak merasakan manfaat dari kegiatan pemerintah desa tersebut. Hal demikian menunjukkan bahwa kegiatan penggunaan dana desa di

Desa Tegalorejo dinilai belum dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa Tegalorejo secara menyeluruh.

Berdasarkan indikator kesejahteraan keluarga dari BKKBN, kebutuhan dasar pada sebagian masyarakat Desa Tegalorejo setelah adanya program dana desa, belum terpenuhi seluruhnya, seperti tempat tinggal dengan atap, dinding dan lantai yang baik. Kebutuhan psikologis juga tidak dapat diperoleh secara optimal, seperti pemenuhan gizi dengan mengonsumsi daging, ikan maupun telur. Masyarakat juga kurang aktif mengikuti kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa, sehingga hasil yang diperoleh juga kurang optimal. Hal demikian dikarenakan kegiatan yang diselenggarakan tidak berdampak signifikan pada peningkatan pendapatan masyarakat. Pembangunan masih difokuskan pada pembangunan infrastruktur desa, sehingga kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat menjadi kurang optimal.

Setiap program yang diselenggarakan pemerintah tentunya tidak terlepas dari hal-hal yang dapat menghambat keterlaksanaannya. Begitu pula dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa. Pada Desa Ponggok, permasalahan utama ada pada sumber daya manusia. Sumber daya manusia sebagai penggerak utama setiap kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa. Tanpa adanya sumber daya manusia yang turut serta dengan keterampilan yang dibutuhkan, maka kegiatan tersebut tidak dapat terselenggara dengan baik, dan permasalahan sumber daya manusia yang belum merata di setiap desa ini menjadi permasalahan pemerintah desa dalam mengimplementasikan setiap kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakannya. Akibat dari kurangnya terpenuhinya sumber daya manusia yang bertugas untuk mengimplementasikan kegiatan serta melakukan pengawasan, menyebabkan masyarakat desa belum terdampak secara optimal dari adanya kegiatan tersebut, sehingga masyarakat desa belum berada pada satu visi, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan desa dan masyarakat. Hal tersebut berdampak pada kurang tercapainya target yang diharapkan pemerintah desa dengan diselenggarakannya kegiatan mensejahterakan desa.

Menurutnya, pelaksanaan kegiatan pemerintah desa Kalangan dirasa memiliki hambatan. Hambatan tersebut yaitu kurangnya waktu pelaksanaannya, dan hal tersebut berdampak pada pelaksanaan kegiatan tidak dapat berjalan dengan efektif. Selain itu, kurangnya kepekaan dan respon yang diberikan masyarakat kepada kegiatan yang diselenggarakan juga menghambat pelaksanaan kegiatan.

Hambatan juga dirasakan dalam penyelenggaraan kegiatan di Desa Tegalorejo. Hambatan yang dirasakan yaitu adanya kegiatan lain yang dimiliki oleh karangtaruna. Karangtaruna menjadi sasaran utama dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Tegalorejo, sehingga kelancaran berlangsungnya kegiatan juga berdasarkan tingkat kehadiran dari karangtaruna itu sendiri. Oleh karena itu, dengan banyaknya anggota karangtaruna yang tidak hadir atau absen dalam kegiatan maka manfaat yang seharusnya dapat diperoleh menjadi tidak optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang diselenggarakan menggunakan dana desa di Desa Ponggok berupa pengadaan bantuan peralatan untuk pengembangan usaha desa, pelatihan UKM, program satu rumah satu MCK, memperbaiki rumah kurang layak tinggal, memperbaiki tempat destinasi wisata, memberdayakan masyarakat dan lingkungan. Kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Desa Kalangan yaitu perbaikan dan pembangunan infrastruktur desa, pelatihan menjahit, pelatihan pengelolaan sampah, pelatihan MC atau pembawa acara. Kegiatan yang diselenggarakan Desa Tegalorejo yaitu pembenahan jalan, perbaikan infrastruktur desa, perbaikan lingkungan desa, reboisasi, pelatihan pembibitan lele, menjahit, membuat kripik pare, serta pembinaan olahraga dan hadroh.

Bentuk kegiatan yang diselenggarakan tersebut pada Desa Ponggok terbukti dapat memperluas lapangan pekerjaan, sehingga menurunkan jumlah pengangguran di desa, dan hal tersebut berdampak pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, berbeda dengan Desa Kalangan dan Desa Tegalrejo. Kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa belum dapat membuka lapangan kerja yang dapat menurunkan jumlah pengangguran, serta belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hambatan yang dialami ketiga desa tersebut adalah kurangnya sumber daya manusia sebagai penyelenggara kegiatan. Selain itu, rendahnya respon masyarakat desa dalam kegiatan yang diselenggarakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2016). Wisata Memancing di Desa Kalangan Pedan Klaten 2016. (<http://lintas-desakalangan.blogspot.com/2016/11/wisata-memancing-di-desa-kalangan-pedan.html>). Diakses pada 25 Oktober 2018.
- Atmadja, A.P.S. (2009). *Keuangan Publik Dalm Perspektif Hukum*. Jakarta: Rajawali
- BKKBN. (2011). Batasan dan Pengertian MDK. (<http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx>). Diakses pada 10 Desember 2019)
- Fahrudin, A. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Jamaluddin, Y., Sumaryana, A., Rusli, B., & Buchari, Rd.A. (2018). Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 6(1), 14-24.
- Jefriando, Maikel. (2017). Dulunya Miskin, Sekarang Desa Ponggok Jadi Makmur. (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3611930/dulunya-miskin-sekarang-desa-pongok-jadi-makmur>). Diakses pada 30 Agustus 2018.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang *Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Jakarta.
- Prasetyo, E.E., & Kristanto, T.A. (2014). Generasi Baru yang Menghidupkan, Cetakan Koran Kompas. (<https://maria.co.id/blog/generasi-baru-yang-menghidupkan/>). Diakses pada 25 Oktober 2018.
- Sari, I.M., & Abdullah, M.F. (2017). Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1 5(1), 34-49.
- Sunu, M.K.K & Utama, M.S. (2019). Pengaruh Dana Desa terhadap Tingkat Kemiskinan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 8(8), 843-872.
- Tangkumahat, F.V., Panelewen, V.V. J., & Mirah, A.D.P. (2017). Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan dan Ekonomi di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Jurnal Agri-Sosio Ekonomi Unsrat*, 13(2A), 335-342.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah*. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*. Jakarta.

Yulita, R. (2016). Efektivitas Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. *JOM FISIP*, 3(2), 1-13